

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antar Negara-negara Arab dengan Israel memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara historis, konflik antara Israel dengan negara-negara Arab menjadi isu yang dinamis, karena banyaknya kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Konflik ini bukanlah konflik biasa yang dengan mudah dapat diatasi. Walaupun berbagai cara melalui militer maupun jalur diplomatik telah dilakukan, namun karena terlibatnya banyak aktor dan masalah yang telah berakar sejak lama menyebabkan isu ini menjadi meluas dan belum juga teratasi hingga saat ini.

Salah satu aktor yang terlibat adalah Yordania atau *The Hashemite Kingdom of Jordan*. Yordania dan Israel merupakan negara-negara bertetangga yang hanya dipisahkan oleh Sungai Yordania di daerah timur tengah. Dimana Yordania terletak dibagian timur Sungai Yordania, sedangkan Israel di bagian barat Sungai Yordania dan berbagi wilayah dengan Palestina di tepi barat sungai. Meski lokasi negaranya yang berdekatan, hubungan antar kedua negara tidaklah selalu harmonis. Banyak terjadi dinamika dalam hubungannya, seperti pada saat pecahnya perang arab.

Pada tahun 1948, perang Arab-Israel pertama pecah melibatkan Israel melawan lima negara Arab yaitu Yordania, Irak, Lebanon, Suriah dan Mesir. Dalam peperangan ini, Yordania berperan penting dalam melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem melawan invasi Yahudi (*The Hashemite Kingdom of Jordan*, 2016). Setahun kemudian dibentuk deklarasi gencatan senjata dan perbatasan sementara yaitu *Green Line*, dimana Mesir mengambil alih jalur gaza dan Yordania mengambil alih wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat (Candra, 2015).

Tidak berhenti disitu, konflik antara Yordania dan Israel kembali pecah pada 1967, yang dikenal dengan "*The Six Days War*". Melibatkan Israel melawan Negara-negara Arab (Yordania, Suriah dan Mesir). Awal perang ini terjadi dikarenakan pembagian pengairan Sungai Yordania, dimana

Israel berencana mengalihkan perairan menuju Gurun Naqab namun Negara-negara Arab tidak menyetujui dan merasa dirugikan oleh rencana tersebut. Sehingga perbedaan pendapat tersebut semakin besar dan menyebabkan perang terjadi (The Hashemite Kingdom of Jordan, 2016).

Dilihat dari hubungan keduanya yang tidak berjalan baik, bahkan bermusuhan, Israel dan Yordania nampak akan sulit untuk mencapai hubungan yang harmonis dan damai. Apalagi selama beberapa dekade sebelumnya, hubungan keduanya hanya diliputi oleh peperangan dan ketidakpercayaan (Safitri, 2017).

Namun ternyata peristiwa mengejutkan terjadi saat kedua negara setuju untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai "*Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan*". Perjanjian di tandatangani pada 26 Oktober 1994 oleh Raja Yordania saat itu yaitu Raja Hussein bersama Perdana Menteri Yitzak Rabin sebagai perwakilan Israel dan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton sebagai mediator. Perjanjian ini merupakan pencapaian kedua Israel setelah Mesir dalam strateginya untuk berdamai dengan Negara-negara Arab tetangga (Haberman, 1994).

Perjanjian ini menghasilkan berbagai reaksi dunia Internasional terlebih negara-negara Arab yang mengecam Yordania untuk melakukan perdamaian dengan musuh lama mereka. Namun Yordania memilih untuk mengesampingkan ancaman sekutunya dan tetap menyetujui kesepakatan dengan Israel.

Dalam perjanjian berisikan tentang penyelesaian sengketa tanah dan air yang berlangsung lama antar keduanya, pengakuan terhadap peran Yordania dalam melindungi tempat-tempat suci di area Yerusalem dan kesepakatan Israel mengakui Negara Palestina di beberapa wilayah di tepi barat Sungai Yordania. Dengan perjanjian tersebut juga, membuka kerjasama diantara kedua negara diberbagai bidang seperti perdagangan hingga pariwisata (Schenker, 2014).

Dalam perjanjian pertama membahas tentang perbatasan antara kedua negara dan kepemilikan atas tanah Baquora dan Al-Ghamar. Baquora merupakan salah satu daerah di daerah utara

Yordania dan Ghamar yang terletak di daerah selatan. Dalam Annex I perjanjian damai tersebut menjelaskan bahwa daerah Baqura dan Al-Ghamar berada dibawah kedaulatan Yordania, dan Israel diberikan hak status kepemilikan dan hak perjalanan khusus di kedua tanah tersebut atau bisa dikatakan “menyewa” dalam kurun waktu tertentu (Jewish Virtual Library, 2006).

Perjanjian terkait air berisikan tentang kesepakatan kedua negara dalam pembagian sumber air dan bekerjasama secara bilateral terkait penanganan kontaminasi sumber daya air. Israel juga menyetujui menyediakan sumber air untuk Yordania sebesar 75 liter³ pertahun, sebagai gantinya Yordania mengakui alokasi hak air Israel di Sungai Yordania dan Yarmouk (Jewish Virtual Library, 2018).

Berbagai kerja sama juga dilakukan oleh Yordania dan Israel seperti dibidang perdagangan dan kerjasama ekonomi. Kerja sama keduanya dimulai dengan perjanjian perdagangan yang disetujui pada tahun 1995. Perjanjian damai dengan Israel merupakan salah satu pilar dari stabilisasi ekonomi, politik dan geostrategis. Setelah penandatanganan perjanjian damai tersebut, AS memberikan investasi dan menjanjikan menyediakan invCestor asing untuk berinvestasi di Yordania serta mengurangi beban utang luar negeri Yordania sebesar \$702 juta (Yitzhak, 2017).

AS juga memberikan bantuan ekonomi yang cukup besar pada Yordania saat situasi ekonominya sedang terpuruk diawal tahun 2000-an dan mensupport bantuan terkait Arab Spring serta perang di Suriah dan Irak mencapai \$1,5 miliar pada tahun 2015-2017 (Gal, 2018). Pengaturan ini memberikan dampak besar terhadap pemulihan keuangan Yordania yang mengalami krisis akibat perang teluk sebelumnya.

Dalam bidang impor-ekspor, pada 2010 ekspor Yordania mencapai 80% sedangkan Israel mencapai 50% (Jewish Virtual Library, 2018). Tahun 2013 produk impor Yordania dari Israel mencapai \$ 99 juta dan ekspor mencapai \$ 56 juta. Dengan sebagian besar produk merupakan produk nabati, batu mulia dan logam, produk kertas, tekstil, mesin, peralatan listrik produk-produk kimia, mineral (Israel Ministry of Foreign Affairs, 1998).

Selain itu, Perjanjian QIZ (*Qualifying Industrial Zone*) juga ditandatangani oleh Yordania, Israel dan Amerika Serikat yang berisi penetapan kawasan industri sebagai kolaborasi bisnis antar Israel-Yordania dengan dukungan Amerika, sehingga produknya akan diimpor ke pasar Amerika Serikat (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2014). Perjanjian ini membuat kerjasama perdagangan Yordania-Israel meningkat pesat dan membantu membuka pasar luar untuk kedua negara hingga ke Uni Eropa.

Perjanjian QIZ telah memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan luas kawasan industri, zona perdagangan bebas untuk berbagai kegiatan industri berorientasi ekspor, potensi ekonomi yang besar dari perdagangan transit regional hingga investasi dan memperluas lapangan kerja di berbagai wilayah pinggiran Yordania (Gal, 2018). Kerja sama bilateral lain juga dilakukan diberbagai bidang seperti pertanian, akademik, penerbangan hingga pariwisata.

Setelah pendatangan perjanjian damai 1994, kerjasama antara Yordania dan Israel menjadi terbuka dan berkembang di berbagai bidang menjadikan Yordania sebagai partner penting Israel dan Israel sebagai aset penting Yordania. Kerjasama kedua negara pun telah memberikan keuntungan terhadap Yordania. Meskipun kerjasama antar kedua negara sudah berlangsung lumayan lama, pernyataan mengejutkan datang dari pemerintah Yordania yang pada 2018 lalu menyatakan akan mengakhiri sebagian dari perjanjian damai 1994 tersebut.

Perjanjian damai tersebut merupakan tonggak awal dari tujuan menjalin hubungan yang harmonis antara Yordania dan Israel, juga sebagai pembuka jalan kerjasama antar kedua negara dimana juga berperan menjaga keharmonisan sebagai negara bertetangga serta meningkatkan perekonomian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah :

Mengapa Yordania membatalkan Perjanjian Damai tahun 1994 dengan Israel?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis masalah ini, sangat penting untuk menentukan kerangka teori. Penulis akan menggunakan sebuah teori dan konsep. Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat atau fenomena untuk melambangkan suatu gagasan tertentu. Konsep berfungsi untuk memberikan makna, menjelaskan dan menata suatu fakta yang di teliti. Sedangkan Teori berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan suatu kejadian/fenomena tertentu (Mas'ood, 1990).

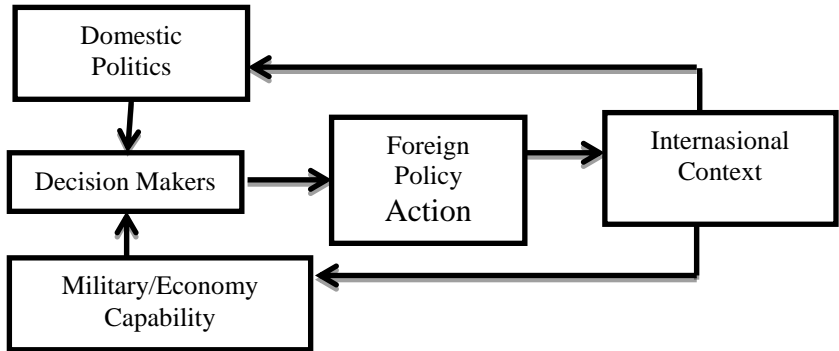
Teori Foreign Decision Making Process

Kebijakan Luar negeri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu negara untuk berinteraksi dengan lingkungan internasional dan negara lain guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Menurut Webber dan Smith dalam bukunya menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang terdiri dari nilai, tujuan, pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil satu negara dimana pemerintah yang sebagian besar mengambil peran utama dalam bertindak dengan lingkungan eksternal atau internasional (Webber & Smith, 2002).

Sedangkan menurut William D.Coplin dalam bukunya mengatakan untuk mengetahui perilaku dari suatu negara, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa pemimpin negara tersebut membuat keputusan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai hasil dari dewan pertimbangan yang mempengaruhi negara pembuat kebijakan luar negeri, dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori yang pertama adalah politik dalam negeri di negara-negara pembuat keputusan kebijakan luar negeri. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga konteks internasional posisi tertentu di mana negaranya menemukan dirinya secara khusus dalam kaitannya dengan negara lain dalam sistem (Coplin, 1992).

Untuk memudahkan dalam menjelaskan pengaruh 3 faktor tersebut, penulis akan menyertakan diagram teori dari pengambilan keputusan menurut Coplin, sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa politik domestik dan kapabilitas militer/ekonomi dipengaruhi oleh konteks internasional dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

D. Situasi Politik Domestik

Suatu sistem politik atau stabilitas dalam negeri dapat membentuk aspek-aspek politik luar negeri. Sehingga keadaan politik dalam negeri dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri sebagai tanggapan dari suatu situasi tertentu. Dalam pengambilan kebijakan di Yordania, keputusan banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor tertentu yang disebut “*Policy Influencer*” oleh Coplin dalam bukunya.

Policy Influencer menurut William D. Coplin adalah aktor politik domestik dalam pengambilan suatu keputusan. Hubungan keduanya dilihat dari pengambil keputusan yang membutuhkan *policy influencer* sebagai sumber dukungannya dan *policy influencer* yang membutuhkan pengambil keputusan untuk memenuhi tuntutan nya agar dijadikan suatu kebijakan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka dukungan terhadap mengambil keputusan dapat hilang (Coplin, 1992).

Dalam bukunya, William D. Coplin menjelaskan terdapat 4 jenis *policy influencer* yang mempengaruhi pengambilan keputusan negara, yaitu :

a. *Bureaucratic Influencer*

Merupakan individu maupun organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu pengambil keputusan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam urusan politiknya, Yordania memiliki satu tokoh dominan yaitu adalah raja sebagai pemimpin pemerintahan negara. Tokoh tersebut merupakan raja saat ini yaitu Raja Abdullah II, sebagai aktor yang berperan secara signifikan dalam pengambilan kebijakan di Yordania baik dalam maupun luar negeri. Dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi/militer dan konteks internasional.

Dalam sistem pemerintahan Yordania memiliki Majelis Nasional atau yang disebut dengan parlemen, terdiri atas majelis tinggi (Senat, atau *House of Notables*) yang ditunjuk oleh Raja dan majelis rendah terpilih (Dewan Perwakilan Rakyat, atau Kamar Deputy). Parlemen ini berfungsi sebagai perwakilan dalam pencapaian kepentingan rakyat dan sebagai pembuat keputusan untuk memenuhi kepentingan rakyat Yordania (Fanack, 2009).

Dalam kasus ini, Parlemen dan Rakyat Yordania mengambil peran besar dapat dilihat Yordania juga menuntut kerajaan untuk meninjau kembali perjanjian damai dengan Israel karena ketegangan terus meningkat antara kedua negara (i24NEWS, 2019).

b. *Partisan Influencer*

Sebagai kelompok yang bertujuan menyampaikan tuntutan-tuntutan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Partai Politik dalam sistem demokrasi merupakan salah satu contoh dari jenis kelompok ini. Biasanya mereka berupaya mempengaruhi kebijakan tertentu dengan cara menekan para pembuat kebijakan tersebut.

Yordania merupakan negara multi-partai yang partai terdaftarnya terdapat sekitar 30 partai-partai kecil yang

memiliki perbedaan ideologis antara partai nasionalis dan partai kiri. Namun satu-satunya partai yang terorganisir dan efektif dengan ideologi yang jelas dan pengikut nasional adalah Front Aksi Islam (IAF) (Nations Encyclopedia, 1997).

c. *Interest Influencer*

Yaitu gabungan kelompok individu yang memiliki kepentingan yang sama. *Interest influencer* biasanya melakukan kampanye dengan menulis surat yang diarahkan kepada para pengambil keputusan, selain itu juga pada *bureaucratic* dan *partisan influencer*. Kelompok ini juga bisa menjanjikan dukungan finansial atau mengancam menarik dukungannya. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, *interest influencer* pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

Dalam kasus ini, *Interest Influencer* dapat diartikan sebagai masyarakat Yordania itu sendiri. Dilihat dari peran masyarakat terhadap isu ini seperti pada tahun juli 2017 lalu, ratusan masyarakat Yordania melakukan demonstrasi di sekitar kedutaan Israel di Yordania menuntut pembatalan perjanjian damai tahun 1994. Selain itu pada oktober 2018 masyarakat Yordania juga pernah melakukan protes besar-besaran menuntut pengembalian tanah Baquora dan Ghamar yang disewakan kepada Israel sesuai perjanjian damai tahun 1994 kepada Yordania serta menuntut pengusiran Ambassador Israel dan menutup kedutaan Israel di Yordania (Halevi, 2018).

d. *Mass Influencer*

Yakni kumpulan opini publik yang dibentuk oleh media massa yang nantinya akan menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri.

Dalam kebijakan Yordania tentang pemutusan perjanjian damai 1994 dengan Israel, politik domestik menjadi faktor penting yang mempengaruhi. Dapat dijelaskan melalui jenis-jenis influencer tersebut, dimana

pengambil keputusan dalam hal ini Raja Abdullah II, selalu berdasarkan pada suara masyarakat Yordania.

E. Kapabilitas Militer dan Ekonomi

Suatu negara haruslah memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan keamanan dan pertahanan negara. Seperti yang diketahui bahwa Yordania dan Israel merupakan negara berdekatan yang berbatasan langsung dan hanya dipisahkan oleh Sungai Yordania. Daerah Baqura dan Ghumar merupakan bagian dari kedaulatan Yordania dan berbatasan langsung dengan Israel. Sesuai dengan isi perjanjian Annex I bahwa kedua daerah tersebut tetap akan menjadi wilayah berdaulat Yordania, namun Israel akan diberikan hak khusus berupa akses bebas melakukan perjalanan serta hak untuk membangun lahan pertanian yang saat ini menyokong perekonomian para petani Israel (Yitzhak, 2017).

Keamanan dan pertahanan untuk melindungi warga negara merupakan perhatian utama suatu negara, begitupun Yordania. Melihat wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Israel menjadikan penting bagi Yordani menjaga serta melindungi kedaulatannya. Kekhawatiran warga Yordania semakin meningkat karena adanya penembakan warga negara Yordania oleh polisi keamanan Israel di Amman pada 2017 lalu juga, memunculkan skeptis Yordania terhadap Israel yang dapat mengancam keamanan warga negaranya (Hasan, 2018).

Krisis ekonomi juga dialami oleh Yordania beberapa tahun belakangan. Krisis ini dipicu karena membengkaknya utang nasional mencapai 40 miliar dolar. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah refugees atau pengungsi. Yordania terkenal sebagai salah satu negara penerima pengungsi terbesar yang berasal dari Palestina dan Suriah. Sehingga suntikan dana bantuan menjadi penting dan dianggap sebagai cara mempertahankan kepentingan strategis Yordania. Pada Arab Spring tahun 2011 lalu, Yordania dikabarkan menerima lebih dari 10 miliar dolar bantuan dana asing (Levine, 2018).

Keadaan ekonomi Yordania yang sedang mengalami krisis malah diperburuk dengan adanya pembengkakan pengungsi yang masuk ke Yordania. Ledakan pengungsi ditambah krisis ekonomi Yordania yang belum terselesaikan menyebabkan defisit anggaran belanja negara. Hal ini diperburuk lagi dengan kebijakan Amerika Serikat yang berpihak kepada Israel dan memotong dana bantuannya ke UN untuk pengungsi Palestina dari yang sebelumnya AS sebagai pendonor terbesar biasa menyumbang sekitar 364 juta dolar AS, pada 2017. Namun pada tahun 2018 hanya memberikan sumbangan sebesar 60 juta dolar saja (Utomo, 2018). Kebijakan AS ini tentu berefek besar pada perekonomian Yordania yang pada dasarnya mengandalkan dana bantuan.

F. Konteks Internasional

Menurut William D. Coplin, terdapat 3 elemen yang membahas konteks internasional terhadap pengambilan kebijakan luar negeri, yaitu geografi, ekonomi dan politik. Kebijakan luar negeri dari suatu negara biasa dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri negara lain yang mempengaruhi ketiga elemen tersebut.

Terjalinnnya hubungan diplomatik antara Yordania-Israel yang dimulai dari adanya perjanjian damai tahun 1994 pada awalnya menimbulkan banyak pertentangan dari negara-negara uni arab. Ditambah lagi situasi politik di Yordania yang belum stabil pada saat itu. Namun Yordania memilih untuk mengabaikan pendapat negara-negara sekutunya dan tetap melakukan perjanjian dengan Israel (Hardy, 2003).

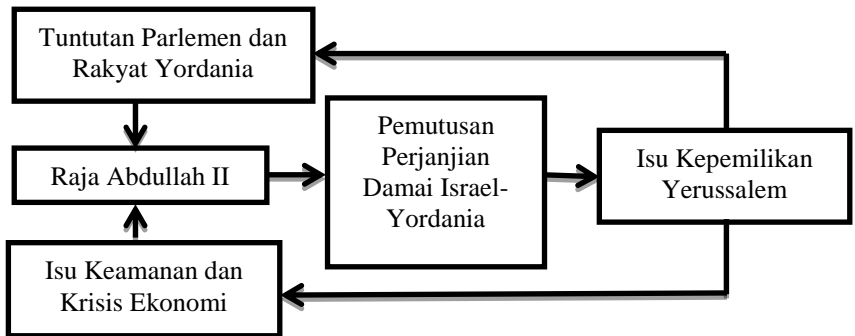
Pada perjanjian damai 1994, Israel mengakui peran Yordania menjaga situs-situs suci di Yerusalem dan posisi ini dipertegas dengan adanya perjanjian antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Raja Yordania Abdullah II menegaskan kembali peran bersejarah Yordania sebagai pemelihara situs-situs suci di Yerusalem (Prusher, 2013).

Keputusan Israel menutup masjid Al-Aqsa pada dan Yerusalem untuk pertamakalinya dalam 14 tahun, menyebabkan ketegangan dari hubungan Yordania dengan Israel kembali ikut

meningkat (The Guardian, 2014). Diperburuk dengan pernyataan Amerika Serikat pada 2018 yang mengakui Yerussalem sebagai ibu kota dari Israel. Kebijakan Israel dan pengakuan Amerika Serikat dianggap pelanggaran karena tidak sesuai dengan Resolusi PBB tentang pembagian wilayah Palestina dan Israel. Sebagai penjaga Yerussalem, sudah sepantasnya Yordania berada di posisi melindungi Yerussalem dari penguasaan Israel.

Isu yang menimpa Yerussalem tentu saja menjadi pembahasan penting bagi negara-negara arab melihat Yerussalem sebagai tempat untuk berbagai peninggalan situs-situs islamiah yang penting bagi kaum muslimin. Adanya ketegangan di Yerussalem tidak hanya mempengaruhi hubungan Yordania-Israel, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara-negara arab lain dengan Yordania. Dimana pengakuan AS akan mendorong negara Arab yang notabenenyatelah menjalin hubungan dekat dengan AS untuk mengambil peran penting di Yerussalem.

Penulis akan mencoba menggambarkan melalui teori *decision making process* menurut William D. Coplin, sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Aplikasi Teori Decision Making Process

G. Hipotesis

Berdasarkan implementasi dari teori decision making process diatas, maka penulis menemukan hipotesis terkait faktor Yordania memutuskan perjanjian damai 1994 dengan Israel, sebagai berikut :

- a. Pengakuan sepihak Israel terhadap kepemilikan Yerusalem.
- b. Kekhawatiran Yordania atas keamanan perbatasannya dan krisis ekonomi Yordania yang semakin memburuk pasca aneksasi Israel di Yerusalem.
- c. Adanya tuntutan dari Parlemen dan rakyat Yordania yang meminta pembatalan perjanjian damai dengan Israel, memaksa Raja Yordania Abdullah II untuk mengambil keputusan mengikuti tuntutan tersebut untuk mempertahankan kepentingan dan dukungan rakyat.

H. Batasan Penelitian

Untuk menetapkan batasan untuk penelitian ini, penulis akan mengamati kembali pada tahun dimulainya penandatanganan perjanjian damai Yordania-Israel yaitu pada tahun 1994 hingga tahun 2019 selama berjalannya perjanjian tersebut untuk menganalisa faktor-faktor dibalik alasan Yordania ingin melakukan pembatalan terhadap beberapa bagian dari perjanjian damai 1994.

Namun keterbatasan ruang lingkup analisis tidak akan menghalangi penulis untuk menggunakan data lain diluar periode waktu yang ditentukan jika dianggap relevan dan perlu.

I. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai yaitu :

1. Memahami isi Perjanjian Damai Israel-Yordania Tahun 1994.
2. Mengetahui hubungan Yordania-Israel pasca penandatanganan Perjanjian Damai tahun 1994
3. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong Yordania ingin membatalkan Annex I perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel.

J. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap alasan Yordania melakukan pemutusan perjanjian damai dengan Israel berdasarkan data-data yang ada. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal, situs internet, serta media massa. Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang selanjutnya disesuaikan dengan konsep dan teori yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

K. Sistematika Penulisan

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, batasan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Menjelaskan tentang politik luar negeri Yordania serta hubungan diplomatik Yordania dengan Israel.
- Bab III : Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Yordania mengambil keputusan ingin mengakhiri perjanjian damai dengan Israel.
- Bab IV : Kesimpulan.